

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan yang terjadi di dalam organisasi internasional membawa konsep demokrasi memiliki pandangan yang baru, terlebih lagi setelah melihat kompleksitas hubungan internasional mengenai demokrasi sejak perang dunia ke 2. Pada zaman dahulu, terdapat banyak negara dengan pemimpinnya yang mengatasnamakan demokrasi namun disalahgunakan oleh pemimpin diktator dengan cara menggunakan suara rakyat untuk kepentingan diri sendiri (narsisme). Akan tetapi, melihat situasi dunia internasional yang sudah berkembang, arti dari demokrasi pun juga ikut meluas.

Demokrasi merupakan sebuah konsep yang di mana kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat, di mana rakyat dapat menggunakan suaranya untuk memilih atau menyatakan pemikirannya terhadap suatu pemimpin atau negara dan memiliki sebuah kebebasan. Negara yang menggunakan sistem demokrasi, umumnya menjunjung tinggi suara rakyat dan kebebasan, seperti Amerika Serikat, Indonesia, dan negara demokratis lainnya.¹ Dengan adanya demokrasi, maka masyarakat akan mendapatkan kebebasan, keadilan, serta perdamaian dunia. Dalam suatu sistem pemerintahan, konsep demokrasi bukanlah suatu faktor tunggal. Di sisi lain, pemerintah juga harus melihat faktor pendukung lainnya yang harus dicapai oleh

¹ Pitman B. Potter, 'Democracy and International Relations', *World Affairs Sage Publications, Inc.*, Vol. 125, No. 2 (Summer., 1962), hal 102, <https://www.jstor.org/stable/20670139> (diakses 16 Februari 2022).

suatu negara tersebut. Dalam hal ini, demokrasi dapat mendorong terciptanya kepentingan nasional yang merata.

Kondisi global saat ini memaksakan negara untuk menjalin sebuah relasi dengan negara lain guna mempertahankan kekuatannya dan meraih kepentingannya. Dalam proses pencapaian kepentingan tersebut, negara harus memiliki kekuatan dalam berbagai bidang, seperti; ekonomi, politik, dan keamanan. Hal ini dipahami sebagai suatu bentuk dari kepentingan nasional, yang mana hal tersebut merupakan kebutuhan dan keinginan yang dirasakan negara berdaulat dalam hubungannya dengan negara lain. Kepentingan nasional merupakan target negara yang berdaulat. Namun perlu dipahami dalam kepentingan nasional, kedaulatan bukan satu-satunya faktor utama yang diperhatikan, mengingat terdapat faktor lainnya yang memiliki kemungkinan untuk mempengaruhi bagaimana jalannya suatu pemerintahan. Faktor lainnya dapat berupa perkembangan ekonomi, pergeseran sistem politik, perbaikan taraf pendidikan dan lain sebagainya.

Dalam suatu sistem pemerintahan sangat memungkinkan jika terdapat aktor yang tidak memiliki dasar mengenai konsep kebebasan, namun disatu sisi mereka mampu untuk mempengaruhi faktor internal maupun suatu negara lain dalam sistem internasional yang berdampak pada kebijakan suatu negara.² Kepentingan nasional tentunya akan mengalami suatu pergeseran ketika terjadi perkembangan globalisasi sistem internasional. Pada saat globalisasi terjadi, maka akan diikuti oleh perubahan terhadap tuntutan negara itu sendiri. Sebagai contoh ketika suatu

² Rifki. Dermawan, "The National Interest Concept In A Globalised International System," file:///C:/Users/owner/Downloads/101-Article%20Text-396-1-10-20200316.pdf (diakses 16 Februari 2022).

negara yang pada awalnya lebih mementingkan perihal politik dan keamanan, ketika terjadi globalisasi sangat memungkinkan jika fokus negara tersebut mengalami pergeseran dan merambat kepada perkembangan ekonomi, teknologi informasi dan sebagainya. Sehingga dalam melihat situasi seperti ini, menjalin sebuah relasi merupakan hal krusial untuk mencapai suatu kepentingan nasional.

Dalam mencapai kepentingan nasional, negara harus memiliki kekuatan. Salah satu contoh yang dapat kita lihat adalah Amerika Serikat. Amerika Serikat merupakan negara yang menyandang status 'hegemon' yang mana mempunyai pengaruh cukup besar apabila dibandingkan dengan negara yang lemah. Menurut filsuf Antonio Gramsci, jika suatu negara tidak dapat menjadi negara yang hegemon, apabila negara tersebut hanya melihat kepentingan mereka sendiri tanpa campur tangan kepada negara lain. Maka dari itu, suatu negara yang ingin menjadi hegemoni harus ikut turun tangan terhadap rakyat yang tidak memiliki kelas dalam masyarakat.³

Amerika Serikat dapat dikatakan sebagai negara hegemon karena AS sendiri dapat memainkan peran utama dalam mengatur, dan menstabilkan ekonomi, politik, dan ideologi dunia.⁴ Tidak hanya itu, kekuatan militer yang dimiliki oleh Amerika Serikat dapat dikatakan cukup kuat untuk memberikan pengaruh kepada negara lain. Dari masa perang dingin terjadi, Amerika Serikat sudah memiliki ambisi untuk memengaruhi banyak negara untuk meluaskan pengaruh. Dengan meluaskan

³ Endah. Siswati, "Anatomi Teori Hegemoni Antonio Gramsci," *Jurnal Translitera* Edisi 5 (2017) (diakses 11 April 2022).

⁴ US Hegemony. <https://archive.globalpolicy.org/empire/analysis/2003/12decline.htm> (diakses 17 Februari 2022).

pengaruh terhadap negara lain, maka hal tersebut tidak hanya berdampak pada ekonomi saja, namun juga akan berdampak hal-hal yang lain, seperti mempermudah interaksi dan kerja sama antar-negara. Maka dari itu, Amerika melihat salah satu kawasan yang memiliki potensi yang lebih besar dalam mewujudkan ambisinya adalah kawasan Asia Tenggara, khususnya di Filipina.

Kawasan Asia Tenggara merupakan kawasan yang kaya, di mana kawasan tersebut memiliki populasi masyarakat yang dinilai cukup banyak serta pasarnya yang besar. Amerika melihat kesempatan untuk meningkatkan kepentingan ekonominya dengan memasuki pasar produk dan bidang industri, serta dengan menjadi rekan ekspor dan impor, dan sebagai tempat investasi asing. Tidak hanya itu, Amerika Serikat melihat bahwa *sea lanes* yang dimiliki Asia Tenggara cukup strategis. Jalur ini merupakan jalur yang sangat penting bagi perdagangan dunia, sehingga Amerika merasa bahwa negaranya harus memiliki akses yang mudah untuk memasuki jalur tersebut untuk mencapai kepentingannya, baik untuk ekonomi maupun militer. Kepentingan selanjutnya diikuti dengan kepentingan politik.⁵ Dengan kondisi Asia Tenggara yang dapat dikatakan belum berdiri dengan kokoh, sangat memberikan celah bagi Amerika untuk mendapatkan kepentingannya yang akan berguna untuk sistem berpolitik.

Salah satu negara di Kawasan Asia Tenggara yang juga menjadi perhatian dari Amerika Serikat sendiri ialah Filipina. Amerika Serikat yang pada saat itu dipimpin oleh Ronald Wilson Reagan, melihat Filipina sebagai negara yang harus

⁵ Dewi. Triwahyuni, "Asia Tenggara Dalam Kepentingan Amerika Serikat," [https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/373/jbptunikompp-gdl-dewitriwah-18612-14-\(pertemu-t.pdf](https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/373/jbptunikompp-gdl-dewitriwah-18612-14-(pertemu-t.pdf) (diakses 17 Februari 2022).

diperhatikan dampak pada masa Perang Dingin, yang mana Amerika ingin memperkuat posisinya di dalam struktur internasional yang anarki. Di masa ini, Uni Soviet juga semakin memperkuat militernya dan hal tersebut menjadi ancaman bagi Amerika. Pertumbuhan komunis mengancam tata kelola global, serta kawasan Asia Tenggara hampir dikuasai oleh komunis, termasuk Filipina. Dengan penyebaran komunis yang ternyata begitu cepat meluas, membuat Amerika khawatir akan hal ini, di mana ketika satu negara di kawasan menjadi negara komunis, sangat memungkinkan negara lain ikut menjadi negara komunis (*domino theory*).⁶

Dalam membangun hubungan yang baik antara Filipina dan Amerika Serikat, keduanya melibatkan ekonomi, keamanan, dan pembangunan, apabila dilihat dari pasca periode kemerdekaan Filipina 1946 – 1986.⁷ Dari cukup banyaknya bantuan yang diberikan oleh Amerika kepada Filipina pada pasca perang dingin, muncullah relasi yang cukup baik antara kedua negara. Filipina yang pada saat itu memiliki militer yang cukup kuat, dirasa dapat membantu Amerika untuk memperkuat militernya. Amerika Serikat juga membentuk dua pangkalan militer di wilayah Filipina yang dinamakan pangkalan angkatan laut Subic, dan pangkalan udara Clark. Kedua pangkalan militer ini telah menjadi satu-satunya fasilitas di kawasan yang tetap berada di bawah kendali Amerika.⁸

⁶ Jerry M. Silverman, "The Domino Theory: Alternatives to a Self-Fulfilling Prophecy", *Asian Survey* University of California Press, Vol. 15, No. 11 (Nov., 1975), hal 916, <https://www.jstor.org/stable/2643548> (diakses 17 Februari 2022).

⁷ "Sejarah Hubungan Bilateral Filipina – Amerika Serikat" https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/16580/4/T1_372014019_BAB%20IV.pdf (diakses 18 Februari 2022).

⁸ Gregory P. Corning, "The Philippine Bases and U.S. Pacific Strategy," *Pacific Affairs* University of British Columbia, Vol. 63, No.1 (Spring., 1990), hal 10-11, <https://www.jstor.org/stable/2759811> (diakses 17 Februari 2022).

Di saat Amerika memfokuskan perhatiannya di Filipina, Filipina mengalami sebuah gerakan perlawanan rakyat yang terjadi pada tahun 1986, atau yang dikenal sebagai revolusi *People Power / Epifanio de los Santos Avenue* (EDSA). Gerakan ini merupakan sebuah tindakan untuk penggulingan seorang diktator oleh rakyat melalui cara nirkekerasan, yang di mana pada saat itu Filipina dipimpin oleh Ferdinand Marcos.⁹ Revolusi EDSA yang menggulingkan Marcos, adalah salah satu bentuk terobosan besar demokrasi di Filipina, dan bahkan menjadi transisi pemerintahan dari otoriter ke demokrasi.

Melihat situasi di Filipina yang dirasa sedang sangat berantakan akibat munculnya gerakan EDSA ini, Amerika merasa bahwa keriuhan ini harus segera diselesaikan karena dinilai cukup mengganggu beberapa kepentingan Amerika dalam Filipina. Perlu diketahui juga, Revolusi EDSA ini merupakan gerakan yang mengatasnamakan demokratisasi di dalam rezim otoriter pada saat itu, dan Amerika juga merupakan negara liberal yang menganut sistem demokratisasi. Melihat situasi seperti ini, penulis ingin melihat posisi yang diambil oleh Amerika terhadap EDSA, dengan melihat aspek pertemanan Amerika yang dipimpin oleh Reagan, dengan Ferdinand Marcos, dan juga posisi Amerika sebagai negara demokratis yang melihat EDSA sebagai gerakan demokrasi. Dengan adanya hal ini, penulis tertarik untuk melihat respons yang diberikan oleh Amerika Serikat terkait EDSA, serta mengetahui kepentingan yang dirasakan oleh Amerika Serikat terhadap respons yang diberikan sebagai pembahasan penulis dalam penulisan tugas akhir.

⁹ B. Herry Priyono, *People Power Filipina & Reformasi Indonesia : Catatan Kritis dari Perspektif Ekonomi - Politik* (PT. Kompas Media Nusantara, 2022), xviii-xix.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dinamika hubungan Amerika Serikat dan Filipina serta aksi revolusi EDSA yang terjadi pada tahun 22 Februari 1986 hingga 25 Februari 1986, terdapat beberapa kemungkinan timbulnya perubahan dinamika kedekatan antara kedua negara tersebut. Campur tangan Amerika dalam revolusi yang terjadi di Filipina merupakan salah satu contoh nyata kegencaran Amerika Serikat dalam upaya menjaga hubungan dengan Filipina agar Filipina tidak jatuh ke tangan komunis, melihat Filipina memiliki letak yang strategis dari sisi geografis dan memiliki kekuatan yang besar di Asia Tenggara untuk memberikan pengaruh. Pada saat itu, Amerika Serikat juga tidak ingin Filipina terlalu lama terpuruk dalam konflik tersebut yang dapat menjadikan Filipina terpecah belah. Oleh karena itu, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu;

1. Bagaimana peran Amerika Serikat dalam dinamika politik dalam negeri Filipina pada masa pemerintahan Ferdinand Marcos 1965-1986?
2. Apa yang menjadi kepentingan Amerika Serikat dalam merespons revolusi EDSA tahun 1986?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Mengevaluasi bagaimana dampak Amerika Serikat selama masa pemerintahan Ferdinand Marcos di Filipina apabila dilihat dari sistem *politik* pada saat itu.
2. Mengidentifikasi alasan Amerika Serikat mengintervensi Filipina dalam revolusi EDSA tahun 1986 melihat dari kepentingan Amerika Serikat.

1.4 Kegunaan Penelitian

Beberapa manfaat yang dapat dicapai melalui penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni diharapkan penelitian ini dapat mendalami tanggapan yang diberikan oleh Amerika Serikat yang pada saat itu dipimpin oleh Ronald Reagan terkait gerakan People Power yang terjadi di Filipina akibat kemarahan masyarakat Filipina terhadap pemerintahan yang otoriter. Tidak hanya itu, tujuan lainnya bermaksud untuk mengidentifikasi latar belakang apa yang menjadi kepentingan Amerika Serikat sampai melakukan respon-respon yang telah dilakukan.

1.5 Sistematika Penulisan

Bab I: Pendahuluan – Bagian ini akan menjelaskan latar belakang dari topik penelitian ini, yang mana menguraikan hubungan antara Amerika Serikat dan Filipina dan kelompok revolusi sebagai aktor, serta konsep-konsep yang akan dibahas. Pada bagian pendahuluan ini, nantinya akan menjelaskan mengenai latar belakang sejarah awal kehadiran Amerika Serikat sebagai negara hegemon di Kawasan Asia Tenggara khususnya Filipina dalam agenda geopolitik, yang menyebabkan Amerika Serikat mempunyai kepentingan di Filipina sehingga ikut mengintervensi Revolusi EDSA 1986. Kemudian akan menjelaskan mengenai

keadaan Amerika Serikat semasa Perang Dingin terjadi, serta dinamika hubungan Amerika dan Filipina.

Bab II: Tinjauan Pustaka dan Kerangka Teori – bagian ini akan menyajikan berisi tinjauan sudut pandang para ahli mengenai topik penelitian yang akan disusun, serta berbagai literatur dengan topik serupa sebagai landasan dari penelitian. Topik dari literatur-literatur yang akan dikaji antara lain mengenai kepentingan Amerika Serikat di Filipina, Revolusi People Power di Filipina dari negara otoriter menjadi demokrasi, serta hubungan bilateral Amerika Serikat dengan Filipina. Selain itu, bab ini juga akan menjelaskan teori dan konsep yang akan penulis gunakan sebagai kerangka teori dalam penelitian ini. Teori yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu teori Neorealisme dengan konsep yakni kepentingan nasional, politik komparatif, *level of analysis*, dan geopolitik.

Bab III: Metodologi Penelitian – Bagian ini akan menjelaskan penyusunan penelitian secara sistematis, yang terdiri atas cakupan penelitian, dan metode-metode yang akan penulis gunakan dalam penyusunan penelitian. Penulis juga akan menjelaskan teknik pengumpulan data, pengolahan, dan analisis data yang digunakan. Penulis juga akan menyajikan data yang telah dikumpulkan untuk memudahkan pembaca memahami penelitian ini.

Bab IV: Hasil dan Pembahasan (Hubungan Amerika Serikat dan Filipina) – pada bagian ini penulis akan menjelaskan mengenai dinamika hubungan Amerika Serikat pada masa pemerintahan Ronald Reagan dan Filipina pada masa pemerintahan Ferdinand Marcos. Dimana Filipina merupakan negara bekas jajahan Amerika pada abad ke 19, seiring berjalannya waktu Amerika dan Filipina memiliki kedekatan

secara relasi, yang nantinya hal tersebut dapat mempengaruhi bagaimana kegiatan timbal balik maupun sengketa yang terjadi di kedua negara ini. Penulis juga akan menyertakan analisa untuk mengelaborasi data dan informasi yang telah ditemukan.

Bab IV: Hasil dan Pembahasan (Revolusi EDSA 1986) – pada bagian ini penulis akan menjelaskan mengenai Revolusi EDSA 1986 yang lebih mendalam. Pada bagian ini, penulis membagi tiga subbab yang berisikan respons Amerika Serikat, kepentingan Amerika Serikat, serta dampak respons Amerika Serikat terhadap kedua negara tersebut, yang nantinya akan dilengkapi oleh analisa penulis.

Bab V: Kesimpulan – bagian akhir ini berisikan kesimpulan penelitian secara menyeluruh yang akan diakhiri dengan hasil analisis yang memiliki cakupan yang lebih spesifik dari bab I – IV untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah disusun penulis dalam bentuk kesimpulan naratif. Selain itu, penulis juga akan menjabarkan mengenai kajian literatur, teori dan perspektif yang menjadi fondasi penelitian, serta konsep dasar yang akan digunakan dalam penelitian ini.

